

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Gambar 1.1 Pendapatan Negara 2006-2016**

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang diaturkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bersifat memaksa. Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 di Indonesia kontribusi terbesar pendapatan negara adalah melalui pajak, puncaknya peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu hingga Rp 299 triliun. Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak

dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak (Deddy, dkk, 2016:2). Namun pengoptimalan pembayaran pajak yang diinginkan oleh pemerintah, jika ditinjau dari wajib pajak maka akan banyak ditemui kendala-kendala untuk mencapai tingkat pembayaran pajak yang optimal.

Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia memungkinkan para wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang tanpa ada campur tangan fiskus pajak. Pemerintah menginginkan agar pendapatan negara melalui pajak selalu tinggi, namun para wajib pajak khususnya perusahaan menginginkan agar laba perusahaan setelah dikurangi pajak tetap tinggi sehingga tetap dapat menarik investor maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan disini memunculkan adanya sikap keagenan (teori agensi) dari pihak perusahaan yang memicu kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun kegiatan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan hanya memanfaatkan celah dari peraturan-peraturan tersebut, namun perusahaan telah sedikit-banyak tidak memperdulikan adanya kontrak sosial yang timbul sejak perusahaan tersebut berdiri (teori legitimasi).

Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak tidak terelakkan lagi tengah marak terjadi, dan kasus yang masih berjalan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ini adalah kasus yang menimpa mantan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Hadi Poernomo. Hadi Poernomo ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan diadili terkait penyalahgunaan wewenang dalam

kapasitasnya saat menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan periode jabatan 2001 sampai dengan 2006 yaitu dengan menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) PPh (Pajak Penghasilan) PT BCA Tbk tahun pajak 1999 sampai dengan 2003 yang diajukan pada 17 Juli 2003. Hadi Poernomo dinyatakan sebagai tersangka dari kasus penggelapan pajak atas penyalahgunaan wewenang tersebut pada PT BCA Tbk dan menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp 370 miliar.

Kasus ini bermula 17 Juli 2003 BCA mengajukan surat keberatan pajak terhadap koreksi pajak atas *Non-Performing Loan* (NPL) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Direktorat PPh. Pihak BCA (Bank Central Asia) menganggap hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal yang mencapai Rp 6,78 triliun harus dikurangi Rp 5,77 triliun karena BCA telah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pada 13 Maret 2004 BCA mengirim surat mengenai keberatan ini kepada Dirjen Pajak tetapi keberatan tersebut ditolak. Namun pada 18 Juli 2004 tepat satu hari sebelum memberikan keputusan final atas keberatan BCA, Hadi Poernomo selaku DJP, melalui nota dinas memerintahkan Direktur PPh agar mengubah kesimpulan keberatan yang diajukan oleh BCA yaitu meminta seluruh keberatan BCA diterima. Setelah mengirim nota dinas, Dirjen Pajak tidak memberi waktu bagi Direktur PPh untuk mengkaji kembali, karena Dirjen Pajak langsung menerbitkan SK (Surat Keputusan) menerima seluruh keberatan BCA.

Dari kasus yang telah menjerat Hadi Poernomo ini masih belum menemukan titik terang terkait dugaan pelanggaran pajak seperti apa yang

dilakukan oleh PT BCA Tbk tergolong tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) ataukah penghindaran pajak (*tax avoidance*). KPK masih mengupayakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) sejak Juni 2016 karena kasus ini merupakan celah yang dapat menjadi permulaan pemeriksaan terhadap komoditas perbankan di Indonesia terkait pembayaran pajak kepada negara.

Bukti kasus diatas menguatkan fakta bahwa *tax avoidance* akan terus terjadi karena masyarakat yang ahli dalam bidang perpajakan dapat menggunakan celah dari penerapan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* tersebut. Sebenarnya tindakan *tax avoidance* sendiri akan dipengaruhi oleh pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat membentuk sistem kinerja yang sehat didalam perusahaan sehingga dapat menghasilkan *output* yang baik dan sesuai dengan peraturan (teori kepatuhan). Seperti yang dikemukakan oleh Friese, dkk (2006) tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir keinginan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang dapat menghasilkan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak. Dari kasus diatas dapat disimpulkan juga bahwa pimpinan atau eksekutif perusahaan berperan penting dalam pengambilan keputusan salah satunya terkait mempertahankan kinerja manajemen (profitabilitas) yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian sekarang, yaitu (1) Deddy, dkk (2016) menyatakan variabel proksi GCG melalui jumlah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax*

*avoidance*, namun proksi GCG melalui jumlah Komite Audit, dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, untuk proksi profitabilitas dan ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, (2) Vivi Adeyani (2015) proksi GCG melalui komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun proksi GCG melalui kepemilikan institusional dan independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, untuk proksi ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, (3) Cahyaning, dkk (2015) proksi GCG melalui kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, untuk proksi karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, untuk proksi profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lain yang berhubungan yaitu (1) Calvin dan I Made (2015) proksi GCG melalui komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, untuk proksi karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, (2) Judi Budiman dan Setiyono (2012) proksi karakter eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, (3) Ida Ayu dan Putu Ery (2016) proksi profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, (4) Dyreng, *et al* (2005) proksi ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan (5) Dyreng, *et al* (2010) proksi karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu diatas terlihat bahwa dari penelitian satu sampai dengan delapan memiliki hasil yang sangat bervariasi hasilnya untuk hubungan antara variabel independen GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *tax avoidance* sehingga menimbulkan *research-gap* yang cukup signifikan dari keseluruhan variabel independen. Dan juga dari kasus pada fenomena diatas membuktikan bahwa tindak penghindaran pajak masih belum bisa dicegah khususnya jika bagian inti perusahaan sendiri tidak dikelola dengan baik dan benar, serta individu yang memiliki otoritas tertinggi diperusahaan tidak memiliki *self control* pada saat memberikan keputusan terkait kinerja manajemen.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian ulang dan memperbaharui populasi penelitian yaitu pada komoditi perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah (BUS) tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada tahun 2010 sampai dengan 2015 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang diujikan terhadap tingkat *tax avoidance* yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Komoditi Perbankan di Indonesia

Penelitian ini dapat dijadikan informasi terbaru mengenai faktor-

faktor yang dapat memberikan dampak pada *tax avoidance* khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat di Indonesia

Penelitian ini agar menjadi informasi baru dan referensi tentang fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh sektor perbankan sehingga dapat dijadikan salah satu bukti bagi bahan pembelajaran.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan baru mengenai fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **DATA**

Pada bab ini memberikan gambaran tentang populasi dan aspek dari sampel yang akan diteliti. Selanjutnya penjelasan tentang analisis dari hasil penelitian dan menjelaskan hasil penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah dan hasil uji hipotesis.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian yang menggambarkan kekurangan dari penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya.